

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah teknik yang dikembangkan untuk membantu orang atau organisasi dalam memonitor transaksi ekonomi. Akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi atau kejadian ekonomi yang bersifat keuangan (Duska, 2011). Akuntansi mempunyai berbagai macam bidang yaitu, Akuntansi Perusahaan (*Business Accounting*), Akuntansi Pemerintahan (*Governmental Accounting*), dan Akuntansi Sosial (*Sosial Accounting*).

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba, melainkan melayani masyarakat dalam urusan dengan pemerintah dan pengawasan pemeriksaan keuangan secara umum. Berdasarkan tujuan tersebut, *Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar* (2002) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan

3. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal
4. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis dana.
5. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba
6. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena bergantung pada peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi pemerintah terbagi 2, yaitu sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD). Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Abdul Halim, 2004). SAPD diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berisikan entitas pelaporan dan entitas akuntansi penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi menjadi suatu kebutuhan bagi setiap pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagai salah satu kegiatan untuk pelaksanaan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara teratur.

Penerimaan kas pada pemerintahan daerah berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan dari anggaran pemerintah provinsi dan penerimaan kas dari penjualan aset daerah. Penerimaan kas dapat dilakukan dengan menggunakan cek kecuali pembayaran

dalam jumlah kecil, biasanya dilakukan dengan dana kas kecil. Kas kecil merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dan digunakan untuk melayani pengeluaran - pengeluaran tertentu, biasanya pengeluaran - pengeluaran yang dilakukan jumlahnya tidak besar, sedangkan pengeluaran pengeluaran dengan jumlah besar biasanya dilakukan dengan bank (berupa cek)". (Soemarso:2004).

Inspektorat Kab Tanah Datar sebagai salah satu badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah dan sebagai bagian dari struktur organisasi Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk tujuan tertentu atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada Inspektorat Kab Tanah Datar?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada Inspektorat Kab Tanah Datar sudah sesuai denganketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis pada tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada Inspektorat Kab Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada Inspektorat Kab Tanah Datar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini, yaitu:

a) Instansi

Bagi Instansi dimana penulis mengadakan penelitian, diharapkan hasil penelitian yang penulis buat dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai pertimbangan dan masukan yang nantinya berguna untuk Instansi.

b) Penulis

Untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja serta mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.

c) Pembaca

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan ini dapat

menambah pengetahuan pembaca dan sebagai referensi dalam menghadapi masalah yang sama dan sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan yang akan dibahas, penulis memberikan sistematika sesuai dengan pokok pembahasan, adapun sistematika tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang penulisan, perumusan masalah, manfaat magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisikan tinjauan teoritis yang berisi teori yang dipelajari di waktu kuliah atau buku-buku pedoman lain dengan judul yang sesuai dengan penulis buat. Terdiri dari pengertian sistem akuntansi, pengertian kas, sistem akuntansi penerimaan kas, dan sistem akuntansi pengeluaran kas

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI, bab ini memuat profil umum dari instansi Inspektorat Kab Tanah Datar, terdiri dari sejarah singkat instansi, visi, misi, motto instansi dan struktur organisasi instansi.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini membahas data yang penulis olah melalui kajian

teori dan sumber- sumber yang berkaitan dengan judul tugas akhir penulis, kemudian akan penulis sajikan dalam bentuk penjelasan guna menjawab rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini berisikan kesimpulan yang di anggap perlu.

